

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2010-2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

FANNY PANGARIBUAN

NIM 12030110120056

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fanny Pangaribuan
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120056
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2010-2012**
Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 04 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 1972 0421 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Fanny Pangaribuan
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120056
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2010-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Juli 2014

Tim Penguji:

1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt (.....)
2. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Fanny Pangaribuan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 04 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,

Fanny Pangaribuan

NIM 12030110120056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” (Filipi 4:13)

“Dum spiro, spero.”- Cicero

(While I breathe, I hope)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Mama tersayang, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of corporate governance mechanisms on earning management in banking company. Corporate governance mechanisms used in this study are independent board composition, audit committee, audit quality, managerial ownership, institutional ownership, and Risk Management Committee.

Earning management is proxied by discretionary accrual that are measured using Beaver and Engel model. The analytical method used was multiple regression. The study sample consisted of 31 banking companies listed in Indonesia Stock Exchange on year 2010-2012. Data were obtained from company financial statements published by the Indonesia Stock Exchange and websites each sample company.

The results showed that the independent board composition, managerial ownership, and firm size has a negative and significant effect on earnings management. Variable audit committee, audit quality, institutional ownership, and Risk Management Committee does not have a significant effect on earnings management in banking company.

Keywords: corporate governance, earning management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *Risk Management Committe*.

Manajemen laba dengan proksi *discretionary accrual* dihitung menggunakan model Beaver dan Engel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Sampel penelitian terdiri atas 31 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Buras Efek Indonesia dan situs masing-masing perusahaan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Variabel komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan *Risk Management Committe* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan perbankan.

Kata kunci: *corporate governance*, manajemen laba

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta, terima kasih untuk doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa diberikan.
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, teguran, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Haryanto S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dukungan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kakakku Susanty, abang-abangku Sonny, Ferry, Olwin, Harry, dan adikku Jimmy yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis Octa, Marina, dan Fitri. *The good, the bad and the ugly, we've been through them all and we're still friends.*
9. Teman-teman Akuntansi Reguler I angkatan 2010 khususnya Kristina, Esy, dan Lena. Terima kasih atas seluruh dukungan, bantuan, dan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.
10. Teman seperjuanganku di tanah rantau, teman-teman alumni SMA Negeri 2 Balige. *Your presence here in Semarang makes me feel like home.*
11. Pebriyanti, Debora, Iban Marcell, dan Leur, *thankyou so much for everything you've done for me. I do appreciate it!*
12. Kak Jane, Puput, Nucha, Upit, Acil, Riri, Rina, Siska, Restu, Firda, Fitri, Nita, dan Nana. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka di kosan Tembangz.
13. Teman-teman KKN Tim II tahun 2013 Desa Kalirandugede, Kabupaten Kendal, Puput, Icha, Mertha, Devri, dan Ari. Terima kasih atas pengalaman berharga dan kebersamaannya.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 04 Juli 2014

Penulis

Fanny Pangaribuan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PROPOSAL	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Manajemen Laba	12
2.1.3 Corporate Governance	17
2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen	19
2.1.3.2 Komite Audit	21
2.1.3.3 Kualitas Audit	22
2.1.3.4 Kepemilikan Institusional	23
2.1.3.5 Kepemilikan Manajerial	24
2.1.3.6 <i>Risk Management Committee</i>	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran	32

2.4 Pengembangan Hipotesis	33
2.4.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen	33
2.4.2 Komite Audit	34
2.4.3 Kualitas Audit.....	35
2.4.4 Kepemilikan Institusional	36
2.4.5 Kepemilikan Manajerial.....	37
2.4.6 <i>Risk Management Committee</i>	37

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel	39
3.1.1 Variabel Dependen	39
3.1.2 Variabel Independen	40
3.1.2.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen.....	40
3.1.2.2 Komite Audit	41
3.1.2.3 Kualitas Audit	41
3.1.2.4 Kepemilikan Institusional.....	42
3.1.2.5 Kepemilikan Manajerial	42
3.1.2.6 <i>Risk Management Committe</i>	43

3.1.3 Variabel Kontrol	43
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	43
3.2 Populasi dan Sampel.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Analisis.....	45
3.5.1 Statistik Deskriptif	45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	46
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	46
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	47
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	47
3.5.3 Analisis Regresi	47
3.5.4 Uji Hipotesis.....	49
3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	49
3.5.4.2 Koefisien Determinasi.....	49
3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t).....	49

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Data	51
4.2.1 Statistik Deskriptif	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	54
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	56
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	59
4.2.3 Uji Hipotesis	60
4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
4.2.3.2 Koefisien Determinasi.....	60
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	61
4.3 Interpretasi Hasil	64
4.3.1 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba	64
4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba.....	65
4.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba	66

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba	67
4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba	68
4.3.6 Pengaruh <i>Risk Management Committee</i> terhadap Manajemen Laba	68
4.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.....	69

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan.....	73
5.3 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Jumlah Sampel	50
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin-Watson.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	55
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Bank	81
Lampiran B Hasil Regresi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan yang menjadi sumber penting dalam menilai kinerja perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi serta menilai kinerja perusahaan. Demikian halnya dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan di sektor perbankan, menggunakan laporan keuangan dalam tugas pengawasannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu wewenang Otoritas Jasa Keuangan meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, dalam hal ini laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan perbankan (sehat atau tidak).

Berbeda dengan industri lainnya, di dalam industri perbankan terdapat regulasi dan kriteria tertentu dari Bank Sentral yang harus dipenuhi, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minimum. Hasil penelitian Setiawati dan Na'im (2001) dan Rahmawati (2006) menunjukkan bahwa adanya regulasi dari Bank Sentral mendorong manajer melakukan manajemen laba, supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Regulasi dari Bank Sentral seharusnya dapat membatasi tindakan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan perbankan. Aturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral diharapkan menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas perusahaan perbankan sebagai perusahaan "kepercayaan" dan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun faktanya regulasi tersebut tidak dapat membatasi tindakan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Kasus pada PT. Bank Lippo Tbk menjadi salah satu contoh terjadinya manajemen laba ada perusahaan perbankan.

Manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan manajer dalam memodifikasi laba akuntansi untuk memperoleh tanggapan positif terhadap kinerja mereka di samping juga untuk memperoleh tanggapan positif dari pasar atas informasi yang disajikannya (Jensen dan Meckling, 1976). Definisi lainnya menurut Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) bahwa manajemen laba merupakan manipulasi laba, baik di dalam maupun di luar batas-batas yang ditentukan oleh *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Adanya fleksibilitas yang

senantiasa terbuka dalam implementasi *Generally Accepted Accounting Principles* menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas tersebut memungkinkan dilakukannya manajemen laba (*earnings management*) oleh manajemen perusahaan (Subramanyam, 1996 dalam Siregar dan Utama, 2005).

Menurut Iqbal (2007) manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham, manajer seharusnya bertanggung jawab untuk mengoptimalkan laba para pemilik saham (prinsipal). Namun di lain pihak, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya menyatakan baik prinsipal dan agen merupakan pemaksimum kesejahteraan diri sendiri, sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan dapat menyebabkan pembuatan keputusan ekonomi yang salah. Pengambilan keputusan ekonomi yang salah dapat berakhir pada kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme yang efektif dalam pengelolaan perusahaan untuk mengurangi tindakan manajemen laba oleh manajer. Mekanisme yang dimaksud yakni mekanisme *good corporate governance*. Mekanisme *good corporate governance* dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik atau pemegang saham memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh agen atau manajer (Shleifer dan Visny, 1997).

Di Indonesia sendiri terdapat regulasi pelaksanaan *good corporate governance* pada bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Selanjutnya bagi bank yang telah *go public* juga harus mematuhi peraturan pelaksanaan *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

Terdapat beberapa mekanisme *good corporate governance* yang dapat dilakukan menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), meliputi mekanisme internal, seperti adanya struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*). Veronica dan Bachtiar (2004) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa mekanisme *good corporate governance* diwujudkan dengan adanya dewan direksi, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.

Saat ini telah banyak penelitian mengenai hubungan antara *good corporate governance* dengan manajemen laba dan hasil yang diungkapkan pun berbeda-beda. Menurut Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) keberadaan dewan komisaris independen akan mengurangi aktivitas pengelolaan laba. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Isnanta (2008) dan Mintara (2008) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba dikarenakan penerapan *good corporate governance* baru dirasakan dampaknya dalam waktu yang panjang, setelah semua aturan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada.

Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang meneliti tentang kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan manajemen laba. Namun Boediono (2005) berpendapat bahwa mekanisme kepemilikan institusional dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba, sedangkan mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba.

Sementara itu Klein (2002) menemukan terdapat manajemen laba pada perusahaan yang mempunyai komite audit yang keanggotaannya terdiri dari sedikit komisaris independen dibandingkan perusahaan yang mempunyai komite audit yang keanggotaannya terdiri dari banyak komisaris independen. Namun penelitian lain mengenai komite audit oleh Nuryanah (2004) mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* di perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih beragam, penelitian ini mencoba meneliti kembali pengaruh berbagai mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Siregar dan Utama (2005), yakni:

1. Penelitian ini memfokuskan pengukuran manajemen laba pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara perusahaan pada industri perbankan dan perusahaan industri lainnya. Dalam industri perbankan terdapat regulasi dan kriteria tertentu dari Bank Sentral yang harus dipenuhi. Adanya regulasi dari Bank Sentral dapat mendorong manajer melakukan manajemen laba, supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan.
2. Penelitian ini menambahkan variabel *Risk Management Committe* sebagai variabel independennya. Keberadaan *Risk Management Committe* dalam perusahaan membuat kualitas pengendalian internal lebih tinggi sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba.
3. Berbeda dengan penelitian Siregar dan Utama (2005) yang menerapkan struktur kepemilikan institusional dan keluarga, penelitian ini menggunakan variabel struktur kepemilikan institusional dan manajerial. Kepemilikan institusional dan manajerial merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*: dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, struktur kepemilikan, dan *Risk Management Committe* terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi kualitas laporan keuangan serta dapat menyebabkan pembuatan keputusan investasi yang salah bagi investor. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
6. Apakah *Risk Management Committe* berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.

2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.
4. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.
5. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.
6. Menganalisis pengaruh *Risk Management Committe* terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mencermati laporan keuangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan mekanisme *good corporate governance* dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis, serta penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini.
- Bab III: Metode penelitian, bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- Bab IV: Hasil dan analisis, bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.
- Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konsep teori agensi atau teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Eisenhardt (1989) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dikatakan bahwa manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Perilaku oportunistik manajer akan memicu konflik kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik dengan agen sebagai pengelola perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Pihak prinsipal menginginkan laba yang optimal dan

profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen yang seharusnya bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan pemilik dan bertindak untuk kepentingan pemilik justru termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, misalnya memperoleh kompensasi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi juga menjelaskan masalah asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Manajer yang merupakan pihak pengelola perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang informasi internal perusahaan dibandingkan prinsipal (pemegang saham). Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, dengan kata lain terjadi asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Kondisi asimetri informasi antara agen dan prinsipal akan memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dalam rangka memaksimalkan kepentingan pribadinya, seperti tindakan manajemen laba.

Masalah keagenan yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta merugikan pemilik (pemegang saham). Untuk mengatasi masalah keagenan, perusahaan dapat menerapkan mekanisme *good corporate governance* yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dapat mengawasi manajemen dan pengambil keputusan, sehingga memudahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Handajani, Sutrisno, dan Chandrarin, 2009).

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan (Ekasiwi, 2012). Menurut Healy dan Wahlen (1999) manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer didorong oleh beberapa motivasi. Faktor-faktor yang mendorong tindakan manajer dalam melakukan kegiatan manajemen laba menurut Scott (2009) dikutip dari Wahyono, Wahidahwati dan Sunaryo (2013) adalah:

1. *Bonus Scheme* (Rencana Bonus)

Laba perusahaan sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan. Dengan demikian para manajer yang bekerja dalam perusahaan yang menerapkan *bonus scheme* akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterima.

2. *Debt Covenant* (Kontrak Utang Jangka Panjang)

Ketika perusahaan semakin mendekati waktu pelanggaran perjanjian utang, para manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat

menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak utang.

3. *Political Motivation* (Motivasi Politik)

Manajer pada perusahaan-perusahaan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode kemamakmuran yang tinggi, dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.

4. *Taxation Motivations* (Motivasi Perpajakan)

Para manajer mengurangi laba yang dilaporkan dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Biasanya CEO yang masa jabatannya akan segera berakhir memaksimalkan jumlah laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan diterima. Demikian halnya para manajer dengan kinerja yang buruk, mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan untuk menghindarkan diri dari pemecatan.

6. Initial Public Offering (Penawaran Saham Perdana)

Informasi keuangan perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik merupakan sumber informasi penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial. Oleh karena itu manajer akan berusaha menaikkan jumlah laba yang dilaporkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh investor.

Setiawati dan Na'im (2000) mengatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Manajemen mempengaruhi laba pada laporan keuangan melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi, antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Untuk menaikkan atau menurunkan jumlah laba yang dilaporkan dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Misalnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi saldo menurun ke metode depresiasi garis lurus, dan mengubah metode perhitungan persediaan dari metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajer dapat mempengaruhi laba dengan cara menggeser periode pendapatan atau biaya dari periode berjalan ke periode akuntansi berikutnya ataupun sebaliknya. Misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.

Ada 7 pola manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2009) dalam Wahyono, Wahidahwati dan Sunaryo (2013) yaitu:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa mendatang.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Pola ini dilakukan pada saat laba perusahaan menurun, yang bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. *Income Maximization* dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Pola ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan *trend* laba.

6. *Aggressive accounting applications*

Pola yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Pola ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

Menurut Praditia (2010) pengukuran atas akrual merupakan hal yang penting dalam mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba. Transaksi akrual memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya, namun tidak mempengaruhi arus kas. Oleh karena itu perusahaan dapat mengatur besarnya pembebanan pada biaya sesuai dengan keinginan manajemen. Dalam penelitiannya Praditia (2010) juga mengemukakan bahwa total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan disebut *normal accrual* atau *non discretionary accrual*, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut *abnormal accrual* atau *discretionary accrual*. Sebagai contoh, peningkatan penjualan secara kredit seiring dengan pertumbuhan perusahaan merupakan *non discretionary accrual*, sedangkan perubahan biaya kerugian piutang karena perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen merupakan *discretionary accrual* (Praditia, 2010).

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer menyebabkan kualitas laba menjadi rendah karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pengelolaan laba ini memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan (Merchant dan Rockness, 1994).

2.1.3 *Corporate Governance*

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. (FCGI, 2006). Konsep *good corporate governance* merupakan konsep yang diajukan sebagai alat untuk memonitor kinerja manajemen dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan (Shleifer dan Vishny, 1997).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) terdapat 5 asas *good corporate governance* (GCG) yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) seluruh organ perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham Umum (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut, pengawasan atas semua aktivitas perusahaan akan lebih efektif sehingga pengendalian internal perusahaan dapat berjalan dengan baik. Praktik seperti itu dalam perusahaan akan memperkecil kesempatan dan itikad buruk manajemen untuk melakukan

kecurangan. Dengan demikian konsep *good corporate governance* ini diajukan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan dan kinerja manajemen serta untuk membatasi tindakan manajemen laba.

Iskander dan Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004) menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Mekanisme internal, cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan pertemuan dengan *board of director*.
2. Mekanisme eksternal, cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur eksternal seperti pengendalian oleh pasar.

Beberapa mekanisme *good corporate governance* yang sering digunakan dalam kaitannya terhadap manajemen laba adalah komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan.

2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pihak penting dalam pelaksanaan mekanisme GCG di perusahaan. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan beberapa hal tentang dewan komisaris. Diantaranya dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan

bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

KNKG juga mengatakan bahwa dalam keanggotaan dewan komisaris harus terdapat komisaris yang independen atau dengan kata lain tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 orang dan sedikitnya 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-29/PM/2004 komisaris independen merupakan anggota yang:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
3. Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Dalam perspektif keagenan, kemampuan dewan komisaris dalam mekanisme monitoring yang efektif bergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley, 1996). Dalam penelitiannya Beasley (1996) juga

mengemukakan bahwa kehadiran dewan komisaris independen dapat mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris independen dapat digunakan sebagai ukuran dalam mengukur keefektifan *monitoring* dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris independen merupakan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

2.1.3.2 Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Tugas komite audit yang diungkapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) yang dikeluarkan oleh KNKG jumlah komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan jumlah yang diatur dalam Surat Keputusan

Ketua Bapepam LK Nomor SE-03/PM/2000 adalah paling kurang terdiri dari 3 anggota, dimana sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar emiten dan perusahaan publik. Salah satu komisaris independen yang menjadi anggota komite audit bertindak sebagai ketua komite audit.

2.1.3.3 Kualitas Audit

Auditor memiliki peran yang besar dalam mendeteksi ataupun menghalangi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Keberadaan auditor eksternal yang independen diharapkan dapat mengurangi tindakan manipulasi laba dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Pada umumnya para pengguna laporan keuangan lebih mempercayai informasi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berkualitas, dengan anggapan bahwa auditor yang berkualitas akan melakukan audit yang berkualitas pula.

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit merupakan kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien, dan melaporkan pelanggaran tersebut. Pengukuran kualitas audit sejauh ini umumnya menggunakan proksi ukuran KAP (*Big Four vs non-Big Four*). Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa KAP *Big Four* memiliki pengetahuan, pengalaman, dan reputasi yang lebih baik dibandingkan KAP lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh DeAngelo (1981) bahwa kualitas audit meningkat sejalan dengan ukuran KAP, karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi sehingga meningkatkan

kemungkinan KAP besar untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan. Dengan adanya keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh auditor dengan skala besar, maka auditor akan lebih dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.3.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh investor dari luar perusahaan yang berbentuk institusi, misalnya bank, perusahaan investasi, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dan lain-lain. Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) dan dianggap dapat menggunakan informasi laporan keuangan lebih baik dibandingkan dengan investor non-institusional. (Siregar dan Utama, 2005).

Kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional cenderung lebih efektif dalam mengawasi pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula usaha pengawasan oleh investor institusional. Kepemilikan yang tinggi dalam suatu perusahaan memberikan insentif yang kuat pada pemilik untuk aktif memonitor tindakan manajemen. Dengan demikian diharapkan peluang manajemen dalam memanipulasi jumlah laba akan semakin kecil.

2.1.3.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari 2 sudut pandang (Itturiaga dan Sanz, 2000) yaitu:

1. Pendekatan keagenan (*agency approach*)

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan.

2. Pendekatan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information approach*)

Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, pihak manajemen akan terdorong untuk meningkatkan kinerja serta mengambil keputusan yang tepat karena manajer akan ikut merasakan langsung manfaat maupun resiko yang terkait pengambilan keputusan tersebut. Manajer yang sekaligus pemegang saham

akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai individu pemegang saham akan ikut meningkat pula (Pujiningsih, 2011). Dengan kata lain, keberadaan kepemilikan manajerial dapat mengurangi motivasi manajemen dalam melakukan pengelolaan laba.

2.1.3.6 Risk Management Committee (Komite Manajemen Resiko)

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, KNKG menyebutkan bahwa komite manajemen resiko merupakan bagian dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 komite manajemen resiko adalah komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen resiko. Secara umum area tugas dan wewenang komite manajemen resiko adalah mempertimbangkan strategi manajemen resiko organisasi, mengevaluasi operasi manajemen resiko organisasi, menaksir pelaporan keuangan organisasi, dan memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Restuningdiah, 2011). Saat ini pembentukan komite manajemen resiko di Indonesia diwajibkan hanya pada perusahaan perbankan.

Ada 2 tipe komite manajemen resiko yang diungkapkan oleh Subramaniam *et al.* (2009) yaitu:

1. Komite manajemen resiko yang berdiri sendiri
2. Komite manajemen resiko yang diintegrasikan dengan komite audit

Komite manajemen resiko yang berdiri sendiri dianggap lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan resiko dibandingkan dengan komite manajemen resiko yang diintegrasikan dengan komite audit. Komite manajemen resiko yang terpisah dari audit dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai resiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Restuningdiah, 2011). Komite manajemen resiko diharapkan mampu mengelola berbagai resiko yang dihadapi perusahaan termasuk menekan praktik manajemen laba yang terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait *corporate governance* dan manajemen laba antara lain dilakukan oleh Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat. Komponen *corporate governance* yang digunakan pada penelitian adalah komite audit dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Siregar dan Utama (2005) melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan (kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional), ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* (kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit) terhadap pengelolaan laba. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan laba adalah

ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek *corporate governance* tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Komponen *corporate governance* yang digunakan adalah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Restuningdiah (2011) meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit, internal audit dan *risk management committee* terhadap manajemen laba pada 35 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *internal governance* yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen, efektifitas komite audit, fungsi internal audit dan keberadaan *risk management committee* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki mekanisme *internal governance* dapat melakukan maupun tidak melakukan praktik manajemen laba.

Wahyono, Wahidahwati dan Sunaryo (2013) meneliti pengaruh *corporate governance* pada praktik manajemen laba di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan

dalam penelitian tersebut adalah dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan perbankan tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba.

Klein (2002) dalam penelitiannya menguji pengaruh *corporate governance* dengan proksi komite audit dan karakteristik dewan direksi terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel yang dipilih memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carcello *et al* (2006) menunjukkan bahwa komite audit independen dengan keahlian keuangan serta ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001)	Corporate Governance and Earnings Management	Audit committee, Board of director characteristic	Komite audit dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
2.	Siregar dan Utama (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earning Management)	Komposisi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan	Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan laba. Kepemilikan institusional, komposisi

				dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba
3.	Nasution dan Setiawan (2007)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan	Komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4.	Restuningdiah (2011)	Komisaris Independen, Komite Audit, Internal dan Risk Management Committee terhadap Manajemen Laba	Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit, RMC	Proporsi dewan komisaris independen, komite audit, internal audit dan keberadaan <i>risk management committee</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
5.	Wahyono, Wahidahwati dan Sunaryo (2013)	Pengaruh Corporate Governance pada Praktik Manajemen Laba: Studi pada Industri Perbankan Indonesia	Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba.

6.	Klein (2002)	Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management	Audit committee and board characteristics (CEO sits on the board's committee and CEO's shareholdings)	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Keberadaan CEO pada dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
7.	Carcello, Hollngswort, Klein, dan Neal (2006)	Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earning Management	Committee audit financial expertise, GCG mechanisms (board size, board independent, audit committee size, audit committee independent, institutional ownership), firm size	- Komite audit independen dengan keahlian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba

2.3 Kerangka Pemikiran

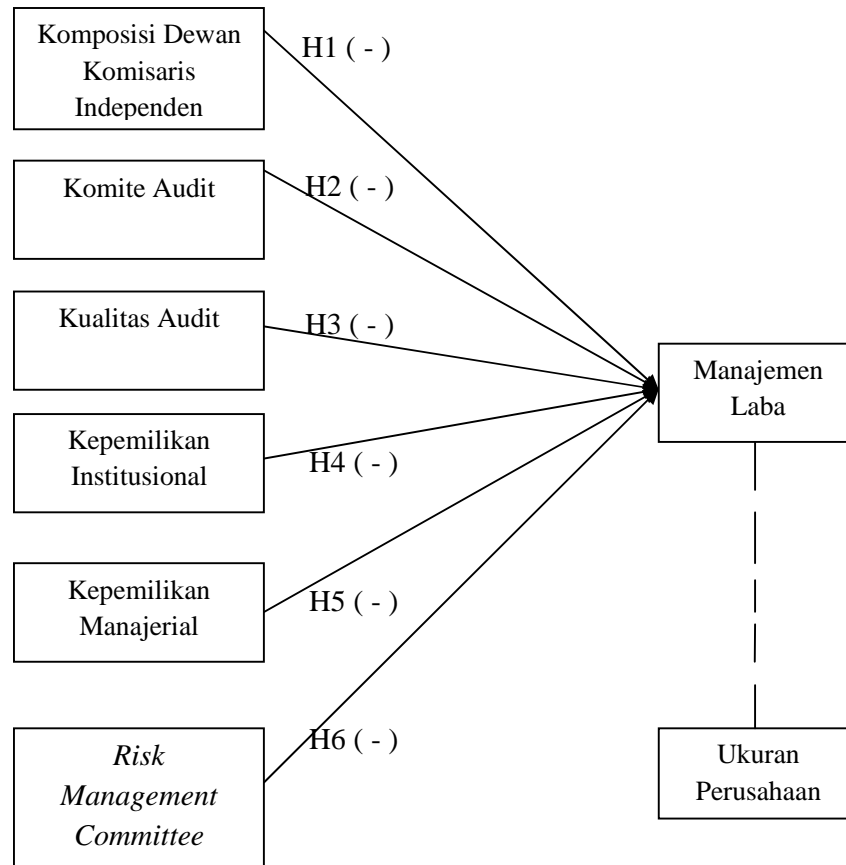
Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang dipicu oleh adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan menjadi salah satu cara untuk menekan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Veronica dan Bachtiar (2004) menyebutkan mekanisme *corporate governance* dapat diwujudkan dengan adanya dewan direksi, komite audit,

kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Sedangkan menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), mekanisme *corporate governance* meliputi mekanisme internal, seperti adanya struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, serta mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *risk management committee* terhadap besaran praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *risk management committee*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen (Fama dan Jensen dalam Ujijantho dan Pramuka, 2007). Berdasarkan teori agensi, keberadaan dewan komisaris sebagai pihak yang independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan prinsipal. Menurut Beasley (1996) dalam Nasution dan Setiawan (2007) masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian terkait dewan komisaris diantaranya dilakukan oleh Peasnell, Pope, dan Young (1998) yang menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat menekan tindakan manajemen laba oleh pihak manajer. Sementara itu Nasution dan Setiawan (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Siregar dan Utama (2005) menemukan hasil yang berbeda dimana komposisi dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Komite Audit

Agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris berjalan efisien, maka dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan teori agensi keberadaan komite audit sebagai pihak yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dibutuhkan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor SE-03/PM/2000, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya harus berasal dari pihak luar emiten yang bersifat independen.

Menurut Wedari (2004) akrual diskresioner pada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit signifikan lebih tinggi dibandingkan pada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005), hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan laba. Hal ini mungkin terjadi karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan dilakukan

untuk memenuhi regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.3 Kualitas Audit

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Auditor independen yang berasal dari KAP *Big Four* dinilai lebih dapat dipercayai dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor *non-Big Four* karena keahlian dan reputasinya yang lebih baik.

Menurut Sanjaya (2008) auditor *Big Four* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan auditor *non-Big Four*. Hal ini disebabkan kemampuan KAP *Big Four* dalam mencegah tindakan manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan Meutia (2004) yang menemukan bahwa semakin tinggi kualitas auditor maka semakin rendah manajemen laba yang terjadi. Namun penelitian Siregar dan Utama (2005) menunjukkan hasil yang berbeda dimana kualitas audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan pendapat Gideon (2005) dalam Pujiningsih (2011) yang menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Berdasarkan teori agensi, adanya kepemilikan institusional yang menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dapat menghalangi tindakan oportunistik manajer dan memaksa manajer untuk tetap bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (pemegang saham).

Penelitian Jiambalvo (1996) menemukan bahwa nilai absolut akrual diskresioner memiliki hubungan negatif dengan kepemilikan institusional. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Koh (2003) dan Mitra (2002) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Namun penelitian Darmawati (2003) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara tindakan manajemen laba dengan kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Boediono, 2005). Oleh karena itu manajer yang juga sekaligus pemegang saham akan terdorong untuk mengambil kebijakan yang tepat dan berupaya memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Berdasarkan teori agensi, adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen melalui penyelarasan kepentingan, dimana pihak manajemen tidak akan lagi bertindak mementingkan diri sendiri (*self interest*).

Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian Midiastuty dan Mahfoedz (2003) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan manajemen laba. Ujijantho dan Pramuka (2007) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.6 Risk Management Committee

Risk Management Committee (RMC) merupakan mekanisme pengawas resiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam *et al*, 2009 dalam Restuningdiah, 2011). Menurut KNKG melalui Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, komite manajemen resiko adalah bagian dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Keberadaan RMC diharapkan

dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam membantu tugas dewan melalui pengawasan resiko, manajemen resiko, dan pengendalian internal. Berdasarkan teori agensi, keberadaan RMC dalam perusahaan dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap sistem manajemen resiko yang telah disusun, sehingga manajer tidak dapat bertindak sesukanya dalam melaporkan laba.

Manajemen resiko pada perbankan diwajibkan berbentuk komite yang berdiri sendiri. RMC yang terpisah atau berdiri sendiri dalam perusahaan dinilai lebih efektif dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas resiko dan manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Risk Management Committe* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba diukur dengan menggunakan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model akrual khusus menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu. Menurut Rahmawati (2006) dalam Wahyono (2013) model Beaver dan Engel merupakan model yang paling sesuai digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba di perusahaan perbankan. Model tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 NPA_{it+1} + \epsilon_{it} \quad (3.1)$$

Dimana:

TA_{it} = total akrual

CO_{it} = *loan charge offs* (pinjaman yang dihapusbukukan)

$LOAN_{it}$ = *loans outstanding* (pinjaman yang beredar)

NPA_{it} = *non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, (d) macet.

NPA_{it+1} = selisih *non performing asset* t+1 dengan *non performing asset* t

$$NDA_{it} = TA - (\beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 NPA_{it+1}) \quad (3.2)$$

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana:

TA_{it} = total akrual

NDA_{it} = akrual non kelolaan

DA_{it} = akrual kelolaan

Maka:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it} \quad (3.3)$$

Dalam model Beaver dan Engel (1996) ini, penentuan akrual total menggunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *risk management committee*.

3.1.2.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham

pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 orang dan sedikitnya 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Menurut Siregar dan Utama (2005), variabel komposisi dewan komisaris independen diukur dengan cara menghitung persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

3.1.2.2 Komite Audit

Keberadaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, diantaranya merupakan dewan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain adalah pihak eksternal yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (Pujiningsih, 2011). Menurut Siregar dan Utama (2005) variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan mempunyai komite audit yang sesuai dengan peraturan Bapepam LK akan diberi nilai 1, dan jika tidak sesuai dengan peraturan Bapepam LK akan diberi nilai 0.

3.1.2.3 Kualitas Audit

Ukuran KAP digunakan untuk mengukur kualitas audit. Menurut Siregar dan Utama (2005) variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*.

Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* akan diberi nilai 1, dan jika diaudit oleh KAP *non Big Four* diberi nilai 0. Berikut ini kategori KAP *Big Four*:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*)
3. KAP *Ernest and Young*
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*

3.1.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor dari luar perusahaan yang berbentuk institusi. Menurut Siregar dan Utama (2005), variabel kepemilikan institusional diukur dengan cara menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap seluruh saham perusahaan.

3.1.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Variabel ini diukur dengan cara menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen terhadap seluruh saham perusahaan. Pendekatan seperti ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Boediono pada tahun 2005.

3.1.2.6 Risk Management Committee

Variabel *risk management committee* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC secara terpisah dari komite lainnya dalam laporan tahunannya diberikan nilai 1, dan sebaliknya diberi nilai 0. Pendekatan seperti ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Subramaniam *et al.* pada tahun 2009.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan skala besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba dalam perusahaan. Penelitian Albrecht & Richardson (1990) serta Lee & Choi (2002) dalam Siregar dan Utama (2005) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar.

Variabel ini diukur menggunakan *logaritma natural* jumlah total aset perusahaan sampel. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan bilangan dalam jumlah besar dengan tidak mengurangi variabilitas makna sebenarnya. Pendekatan seperti ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Chtourou, Bedard, dan Courteau pada tahun 2001.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Penentuan sampel perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Pemilihan perusahaan perbankan dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik dengan perusahaan pada industri lainnya.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2010-2012.
3. Perusahaan memiliki kelengkapan data terkait variabel penelitian yakni komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *risk management committee*, dan ukuran perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pada periode 2010-2012 dan laporan lain yang relevan untuk digunakan dalam penelitian seperti laporan *annual report*. Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2011). *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan *kurtosis* mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai *skewness* dan *kurtosis* mendekati nol (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model penelitian memenuhi asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Menurut Ghozali (2011), ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Dalam mengambil keputusan dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Ghozali (2011) menjelaskan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan

adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan $VIF = 10$. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011) menjelaskan uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2011) menjelaskan uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (DW test).

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$DA = \beta_0 + \beta_1 \%KOMIS + \beta_2 KA + \beta_3 AUD + \beta_4 \%KI + \beta_5 \%KM + \beta_6 RMC + \beta_7 SIZE + \epsilon_i \quad (3.4)$$

Keterangan:

DA	= <i>discretionary accrual</i> (proksi manajemen laba)
β_0	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= koefisien variabel
%KOMIS	= persentase komisaris independen terhadap total komisaris
KA	= komite audit, 1 jika perusahaan mempunyai komite audit yang sesuai dengan peraturan Bapepam LK dan 0 jika sebaliknya
AUD	= kualitas audit, 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big Four</i> dan 0 jika diaudit oleh KAP non <i>Big Four</i>
%KI	= persentase kepemilikan saham institusional terhadap total saham
%KM	= persentase kepemilikan saham manajerial terhadap total saham
RMC	= <i>risk management committee</i> , jika perusahaan mengungkapkan keberadaan RMC secara terpisah dari komite lainnya dalam laporan tahunannya diberikan nilai 1, dan sebaliknya diberi nilai 0.
SIZE	= <i>logaritma natural</i> jumlah total aset perusahaan
ϵ_i	= residual of error
i	= perusahaan ke i

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi = 5%. Apabila nilai sig F (*p-value*) < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dilakukan dengan tingkat signifikansi = 5%. Apabila nilai sig t (*p-value*) < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.